

Penguatan Pengawasan

bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Adapun capaian rencana aksi sebagaimana tabel berikut dibawah:

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan (Data Dukung)	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Gratifikasi (sekretariat)	Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	Sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 700/5241/Set/Itprov tanggal 28 Juni 2019 kepada Ketua KPK RI hal Laporan Gratifikasi, bahwa laporan gratifikasi NIHIL	Inspektorat
		Persentase yang telah melaporkan LHKPN	100%	100%	279 dari 279 wajib LHKPN telah melapor (per 3 Desember 2019)	
		Persentase PNS yang telah melaporkan LHKASN	75%	91%	10.129 dari 11.172 wajib LHKASN telah melapor LHKASN	
2	Penerapan SPIP (Irbn 1)	Maturitas SPIP	3	3.045	Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor LEV-593/PW22/3/2017 tanggal 22 Desember 2018 hal Laporan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017, dengan skor 3,045	Inspektorat
		Persentase PD yang menerapkan SPIP dengan baik	75%	90%	Penerapan SPIP pada OPD ditandai dengan adanya Risk Register	
3	Penanganan Pengaduan (Irbn 1)	Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti (SP4N-Lapor dan Saber Pungli)	95%	91%	SP4N LAPOR : pengaduan per 5 Desember 2019 sebanyak 90 (77 sudah selesai ditindaklanjuti, 12 dalam proses dan 6 belum ditindaklanjuti). Saber Pungli : pengaduan 80 (70 sudah dibahas, 10 belum)	Inspektorat
4	Whistle-Blowing System (Irbn 4)	Persentase pengaduan melalui WBS yang ditindaklanjuti	100%	-	Belum ada pengaduan yang masuk karena WBS masih dalam proses integrasi pada web Pemprov bali	Inspektorat
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Persentase PD yang menerapkan penanganan benturan	75%	-	Sosialisasi Gratifikasi, WBS dan Benturan Kepentingan sesuai	Inspektorat

	(Irbn 4)	kepentingan dengan baik			Surat Undangan Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali Nomor 005/19530/KIN/ORG/ yang dilaksanakan tanggal 21 Nopember 2019 dengan menghadirkan seluruh perwakilan perangkat daerah. Belum ada laporan Benturan Kepentingan.	
--	-----------------	-------------------------	--	--	---	--

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan (Data Dukung)	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
6	Pembangunan Zona Integritas (Irbn 4)	Persentase unit calon ZI/WBK yang lolos dievaluasi oleh Pusat (MenPANRB)	80%	50%	Sekda Provinsi Bali telah mengajukan 6 (enam) unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke Kementerian PAN dan RB sesuai surat Nomor 700/5825/lr.IV/ltprov tanggal 11 Juni 2019. 3 unit kerja yang lolos dievaluasi oleh Menpan	Inspektorat, Biro Organisasi
		Jumlah unit yang berpredikat ZI/WBK	1 unit	1 unit	RS Mata Bali Mandara mendapat predikat ZI/WBK. Tanggal 5 Desember 2019, RSMBM (1 unit kerja) menerima undangan dari Menpan untuk menghadiri penganugerahan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2019.	Biro Organisasi
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Maturitas APIP	level 3	level 2	Saat ini (5 desember 2019) sedang dalam prosese QA oleh BPKP Pusat untuk Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Bali Level 3	Inspektorat